

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan cerminan dari hasil aktivitas tertentu. Lebih lanjut, laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah harus berkualitas karena ada banyak pihak yang mengandalkan informasi keuangan dengan kegunaan yang berbeda-beda (Sa'adah dan Nasrullah, 2021). Menurut Junyantara dan Putra (2021), menyusun laporan keuangan yang berkualitas merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap pemerintah daerah yang tak bisa dikecualikan. Kualitas laporan keuangan itu sendiri mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, termasuk ketertiban administrasi.

Suatu laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila telah sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lebih spesifiknya, suatu laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan memiliki kualitas yang baik jika seluruh karakteristik kualitatif laporan keuangan dapat terpenuhi yang terdiri dari relevansi, keterandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Irafah dkk., 2020). Selain itu kualitas suatu laporan keuangan pemerintah daerah juga dapat dilihat dari hasil laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) berupa pemberian opini. Pada pemerintah daerah Kota Ternate sendiri, kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Ternate dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dikatakan baik dimana laporan keuangan pemerintah daerah Kota Ternate selalu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI. Adapun hasil pemeriksaan LKPD Kota Ternate dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebagaimana yang ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1. Hasil Pemeriksaan LKPD Kota Ternate dan Pemberian Opini

Audit BPK-RI Tahun 2016-2020

Tahun	Opini
2016	WTP
2017	WTP
2018	WTP
2019	WTP
2020	WTP

Sumber: BPK-RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara (2021)

Berdasarkan pada table di atas, diketahui bahwa pemerintah daerah Kota Ternate selalu memperoleh opini WTP dari hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD Kota Ternate. Meskipun demikian, berdasarkan pada hasil pemeriksaan LKPD Kota Ternate tahun 2020, masih terdapat beberapa kelemahan yang dideteksi oleh BPK-RI berupa belum dipatuhinya ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara maksimal dan masih terdapat kekurangan persoalan sistem internal (Kumparan.com, 2021).

Dalam prakteknya, kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan audit internal. Faktor pertama yang dapat menentukan kualitas laporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi.

Menurut Darwis dan Meliana (2020) pemanfaatan teknologi informasi adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan untuk tercapainya visi dan misi dalam pengelolaan keuangan yang baik. Teknologi informasi merupakan salah satu indikator yang berperan penting dalam proses pelaksanaan pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik serta untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dan mendistribusikan informasi keuangan kepada pelayanan publik sehingga setiap entitas pemerintahan diwajibkan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi secara maksimal (Wiranto, 2020). Sejalan dengan hal tersebut, Sa'adah dan Nasrullah (2021) mengemukakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi akan memberikan kemudahan bagi organisasi dalam proses penyusunan laporan keuangan baik dari segi penghematan tenaga maupun kecepatan proses penyampaian dan pemahaman informasi mengenai pengelolaan laporan keuangan. Lebih lanjut, pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan juga dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dengan proses yang relatif lebih cepat.

Penelitian terkait pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan telah dilakukan sebelumnya oleh Mirnawati dkk (2021), Ternalemta dkk (2021), dan Fatimah dkk (2021) yang menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Di sisi lain, penelitian serupa juga dilakukan oleh Fazlurahman dkk (2021) dan Ismunawan dan Andayani (2021) namun menemukan hasil yang berbeda dimana pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah penerapan standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan merupakan sebuah pedoman yang harus diterapkan oleh setiap instansi pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan ditetapkannya standar akuntansi pemerintahan, diharapkan dapat terciptanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Lebih lanjut, standar akuntansi pemerintahan merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintahan (Hania, 2018). Lebih lanjut, Dalimunthe (2021) mengemukakan bahwa dengan adanya penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemerintah lebih memungkinkan untuk menyediakan laporan keuangan dengan kualitas yang lebih baik sehingga dapat dijadikan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dan para pengguna laporan keuangan sehingga pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel dapat tercapai.

Penelitian terkait pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan telah dilakukan sebelumnya oleh Kabib dkk (2021), Aminy dkk (2021), dan Parti dan Gamaliel (2021) yang menemukan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Di sisi lain, penelitian serupa juga dilakukan oleh Harun (2021) dan Baturante dkk (2018) namun menemukan hasil yang berbeda dimana penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah audit internal. Untuk mencapai kualitas pelaporan keuangan yang baik,

maka organisasi perlu untuk melakukan audit internal untuk melakukan pemeriksaan pada berbagai aspek termasuk audit laporan keuangan dimana auditor internal memperoleh dan mengevaluasi bukti laporan-laporan entitas dengan maksud agar memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (Kusumastuti dan Rahayu, 2021). Sejalan dengan hal tersebut, Lestari dkk (2021) mengemukakan bahwa audit internal berperan penting untuk memastikan bahwa proses penyusunan laporan keuangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya audit internal, kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dapat diminimalisir sehingga organisasi dapat menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas yang baik.

Penelitian terkait pengaruh audit internal terhadap kualitas laporan keuangan telah dilakukan sebelumnya oleh Dwiyana dkk (2019), dan Umam dan Sugema (2021) menemukan bahwa audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Di sisi lain, penelitian serupa juga dilakukan oleh Emay dkk (2019) dan Cahmawati dan Romandhon (2021) namun menemukan hasil yang berbeda dimana audit internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, diketahui bahwa masih terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan audit internal terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat kemungkinan adanya variabel lain yang memainkan peran pada hubungan antar variabel tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan

untuk melakukan pengujian lanjutan terkait pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan audit internal terhadap kualitas laporan keuangan dengan mempertimbangkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) sebagai pemoderasi. Adapun kompetensi SDM dipilih sebagai pemoderasi karena kompetensi SDM merupakan salah satu indikator penting yang dapat menentukan keberhasilan organisasi. Baik tidaknya kinerja suatu organisasi sangat bergantung pada kompeten tidaknya SDM yang dimiliki oleh organisasi. Adanya pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar akuntansi dan juga sitem pengawasan dalam suatu organisasi tidak akan dapat memberikan manfaat secara maksimal kepada organisasi jika tidak diimbangi dengan kompetensi SDM. Dengan demikian, dalam memainkan perannya sebagai pemoderasi, semakin baik kompetensi SDM yang dimiliki oleh organisasi akan mampu memoderasi atau memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan pada gap riset yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian lanjutan dengan judul “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi SDM sebagai Pemoderasi pada Pemerintah Daerah Kota Ternate”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah audit internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
4. Apakah kompetensi SDM mampu memoderasi hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas laporan keuangan?
5. Apakah kompetensi SDM mampu memoderasi hubungan antara penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan?
6. Apakah kompetensi SDM mampu memoderasi hubungan audit internal dan kualitas laporan keuangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis dan mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Menganalisis dan mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Menganalisis dan mengetahui pengaruh audit internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Menganalisis dan mengetahui peran kompetensi SDM dalam memoderasi hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas laporan keuangan.

5. Menganalisis dan mengetahui peran kompetensi SDM dalam memoderasi hubungan antara penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas laporan keuangan.
6. Menganalisis dan mengetahui peran kompetensi SDM dalam memoderasi hubungan audit internal dan kualitas laporan keuangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan praktis dari ilmu pengetahuan itu sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dalam lingkup teoritis maupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait peran pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan audit internal dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat terkait bagaimana peran kompetensi SDM dalam memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi terkait dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan faktor penggerak kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yakni pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan audit internal, serta peran moderasi dari kompetensi SDM.